

DINAMIKA MUSLIM MORO DI FILIPINA SELATAN DAN GERAKAN SPARATIS ABU SAYYAF

Abd. Ghofur

Dosen Fak. Ushuluddin UIN Suska Riau

email: ghofur06@yahoo.com

Abstrak

Muslim Moro di Filipina Selatan mendiami wilayah dalam cakupan 13 Propinsi meliputi Mindanao, Sulu, Basilan, Palawan, Balabac, Tawi-Tawi, Cotabato, Cotabato Utara; Lanao Selatan dan Lanao del Norte dan Sultan Kudarat. Wilayah selatan Filipina ini sejak abad ke 15 M berada dibawa kekuasaan Sultan Sulu dan Mindanao. Pada abad 16 M Kolonial Spanyol menjajah Filipina baik di Utara dan Selatan hingga tahun 1898, karena ada persaingan antar koloni maka perebutan kekuasaan antara Spanyol dan Amerika tak terhindarkan, dan Amerika menang ditandai dengan dibuatnya Traktat Paris. Sejak Filipina merdeka tahun 1946, nasib muslim Moro di Selatan Filipina belum juga berubah, karena kuatnya tekanan pemerintah Filipina terhadap minoritas Muslim dengan tetap melanjutkan kebijakan yang dibuat pemerintah kolonial Amerika. Maka tahun 1968 muncul pergerakan muslim yang terorganisir Muslim Independent Movement (MIM); lalu muncul pula Moro Liberation Front (MLF) tahun 1971; pergerakan MLF berganti nama Moro national Liberation Front (MNLF) pimpinan DR. Nur Misuari ; dri MNLF sebagian memisahkan diri membentuk Moro Islamic Liberation Front (MILF) dipimpin oleh Hasyim Selamat; terakhir tahun 1993 dari MILF muncul pergerakan Abu Sayyaf pimpinan Abdurrazak Janjalani. Munculnya beragam bentuk pergerakan muslim disebabkan terdapat perbedaan ideologi perjuangan.

Kata Kunci: Muslim Moro, MNLF, Abu Sayyaf

PENDAHULUAN

Kelompok muslim Moro mendiami wilayah yang tercakup dalam 13 propinsi yang berada di bawah Undang-Undang Empat Zona yang berbeda-beda yaitu: *pertama*, masuk dalam zona IV ada gugusan pulau Palawan; *kedua*, masuk dalam zona IX seperti pulau Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sure; *ketiga*, masuk dalam Zona XI tercakup didalamnya gugusan pulau Cotabato Selatan, Dan Davao del sure; sedangkan *keempat*, masuk dalam zona XII seperti Lanao del Norte, Lanao del Sure, Cotabato Utara, Maguindanao dan sultan Kudarat (Abdullah, 1983:341).

Berdasarkan sumber tradisi setempat, yaitu jaringan geneologis yang disebut dengan *tarsila*. maka banyak penulis menilai Mindanao dan Sulu sebagai miniatur proses Islamisasi di Asia Tenggara. Walaupun sumber *tarsila* cenderung bersifat mitologis, namun terurai secara kronologis dan runtut dalam menjelaskan asal usul komunitas muslim Moro. Dijelaskan dalam catatan sejarah geneologi *tarsila*, bahwa Islam masuk ke wilayah Filipina bagian Selatan (Mindanao

dan Sulu) tepatnya pada tahun 1380 M. Kedatangan saudagar muslim ternyata lebih awal daripada kedatangan kolonial Barat Spanyol, karena Spanyol pertama kali mendaratkan kapal dagangnya tanggal 16 Maret 1521 M. Sebelum kedatangan kolonial Spanyol, wilayah selatan Philipina dibawah kesultanan Mindanao dan Sulu.

Berdirnya kesultanan Mindanao dan Sulu merupakan langkah penting dalam tradisi sejarah politik suku *Tausog* khususnya dan Muslim Moro umumnya. Kekuasaan Sultan Sulu dimulai sejak tahun 1450 M yang dipimpin oleh Sultan Syarif Abu Bakar, sampai akhirnya kekuasaan ini jatuh pada tahun 1915 seiring kuatnya tekanan politik kekuasaan kolonial Amerika. Hal ini berarti kekuasaan kesultanan Sulu bisa bertahan hingga 500 tahun dan tak mampu ditaklukan oleh kolonial Spanyol. Namun sebagian ahli sejarah percaya bahwa kesultanan sebagai suatu sistem baru mengalami kejatuhan sejak tahun 1936 M. Ketika persemakmuran menolak untuk mengakui setiap pewaris yang menentang kekuasaan sultan Jamalul II terakhir berkuasa. Formasi komunitas politik

yang terorganisir sebagai hasil dari unifikasi *banua* (komunitas) yang terpusat memberikan sumbangan berharga bagi suku Tausog di kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu bukan hanya melingkupi masyarakat suku Tausog, tetapi juga mengendalikan beberapa suku lainnya seperti suku Samal, Yakanes, Badjaus yang muslim, termasuk suku-suku yang terletak di wilayah Zamboanga dan Basilan (Bakar,1993:199).

Dalam uraian berikut akan dijelaskan beberapa hal terkait tentang Muslim Moro, diantaranya tentang potret muslim Moro dari awal masuknya Islam hingga lahirnya kesultanan Mindanao dan Sulu; selanjutnya membahas tentang nasib muslim Moro pada zaman penjajahan Spanyol dan Amerika hingga memasuki Filipina Merdeka; tidak kalah menariknya penulis juga menguraikan dan menganalisis pergerakan Muslim Moro: *Moro National Libration Front* (MNLF, 1971) pimpinan Nur Misuari, *Moro Islamic Libration Front* (MILF, 1984) pimpinan Hasyim Selamat dan terakhir gerakan Abu Sayyaf pimpinan Aburrazak Janjalani (1993). Pergerakan Abu Sayyaf yang lahir lebih terbaru ini, cenderung mengarah pada tindakan radikal, ekstrim bahkan banyak pengamat organisasi ini dikategorikan sebagai kelompok terorisme.

PEMBAHASAN

Negara Filipina wilayahnya dibagi menjadi tiga grup pulau yaitu Luzon, Visayas dan Mindanao. Kemudian dibagi menjadi 17 Region, 80 Provinsi, 120 Kota, 1.511 *Munisipalitas* dan 42.008 distrik. Sebanyak 80-an provinsi itu dikelompokkan pula menjadi 17 Wilayah (*'Region'*) untuk kemudahan administratif. Kebanyakan kantor pemerintah memiliki kantor regional untuk melayani provinsi-provinsi di dalamnya. Wilayah ini tidak memiliki pemerintahan lokal yang terpisah, kecuali Mindanao dan Sulu yang banyak Muslimnya dan Wilayah Administratif Cordillera, yang memiliki otonomi sendiri. Jumlah penduduk muslim Filipina sekitar 5-7 Jta jiwa dari sekitar 104 Juta berdasarkan data 2016 (<https://id.wikipedia.org/wiki/Filipina>).

1. Potret muslim Moro Filipina.

Luas Filipina secara keseluruhan sekitar 300.000 KM2, yang terdiri dari 7.109 pulau dan memiliki tiga kelompok kepulauan yaitu, di bagian Utara terdapat gugusan pulau Luzon; di bagian Barat terdapa gugusan pulau Palawan dan Mindanao; sedangkan di bagian Tengah terdapat pulau Bohol, Cebu leyte, Masbate, Negraos, Panay dan Samar; sedangkan di Bagian Selatan terdapat gugusan pulau Mindanao, Sulu, Tawi-Tawi, Balabac, Cotabato dan Lanao (Nugroho, 1996).

Kelompok muslim Moro mendiami wilayah yang tercakup dalam 13 propinsi yang berada di bawah Undang-Undang Empat Zona yang berbeda-beda yaitu : *pertama*, masuk dalam zona IV ada gugusan pulau Palawan; *kedua*, masuk dalam zona IX seperti pulau Sulu , Basilan, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sure; *ketiga*, masuk dalam Zona XI tercakup didalamnya gugusan pulau Cotabato Selatan, Dan Davao del sure; sedangkan *keempat*, masuk dalam zona XII seperti Lanao del Norte, Lanao del Sure, Cotabato Utara, Maguindanao dan sultan Kudarat (Abdullah, 1983).

Ketika dikelompokkan pada sisi *etnik-linguistik*, maka melayu Muslim Moro terdiri dari suku Maguindanao; Marano; Iranos, Sangir, Kalagon, Tausog, Iranum, Molbog, Jamapon, Yakan, Sangil, Palawan, Kolibugan dan Samal. Secara kuantitas berdasarkan sensus penduduk tahun 1990 dari keseluruhan penduduk Filipina sekitar 65 juta jiwa, maka melayu muslim Moro diperkirakan sekitar 5% lebih (2,8 juta Jiwa). Sedangkan pemeluk Katolik diperkirakan sekitar 94% (Ensiklopedia, 2003).

Sedangkan berdasarkan sumber lain menyebutkan pula bahwa saat ini jumlah penduduk muslim Moro hampir 7 juta jiwa karena diperkirakan hampir sekitar 10% dari keseluruhan penduduk Filipina. Kebanyakan muslim Moro mendiami wilayah bagian Selatan yaitu kepulauan Mindanao, Sulu, Basilan, Palawan, Balabac, Tawi-Tawi, Cota

Bato, Lanao Selatan dan Lanao del Norte. Propinsi-propinsi yang didiami muslim Moro cukup banyak misalnya Mindanao (80%); Pulau Sulu (94% muslim); Sultan Kudarat (37% Muslim); Cotabato utara (36% Muslim); Lanao Del Norte (23 % Muslim); Kemudian di sebelah Barat Daya terdapat sekitar 29 % muslim Moro dari seluruh jumlah penduduk (Saleeby, 1990:34).

Keragaman kelompok etnik-linguistik ini tidak menjadikan muslim Moro seperti kelompok yang terpisah, mengingat terdapat banyak kesamaan dari segi bahasa yang mereka gunakan dan agama yang mereka anut. Sebagai contoh bahasa Maguindanao dan Marano memiliki kemiripan dari segi penyebutan dan makna yang terkandung dalam kosa kata, sehingga kedua pengguna bahasa ini saling memahami. Kemudian banyak pula kedekatan secara *linguistik* antara dialek yang digunakan sebagian orang Islam dan Katolik seperti bahasa Tausog (wilayah selatan) yang hampir sama dengan bahasa *Tagalog* dan *Visayan* (ada di wilayah Utara). Kedua bahasa ini digunakan secara luas (*massive*) oleh mayoritas pemeluk Katolik. Menurut pendapat ahli bahasa modern, semua bahasa dan dialek tersebut ternyata berasal dari rumpun keturunan yang sama. Melayu Muslim Moro meski menyandang kelompok minoritas di Filipina, namun mereka adalah komunitas agama terbesar kedua setelah pemeluk Katolik. Posisi seperti ini membuat komunitas melayu Muslim Moro penting bagi perkembangan sosio-politik di negara Filipina pasca kolonialisasi Spanyol dan Amerika.

Kelompok Melayu Muslim Filipina Selatan sering disebut oleh Spanyol dengan bangsa Moro. Menurut catatan sejarah, istilah "*moro*" merujuk pada kata asal yaitu "*moor*", "*mauriscor*" atau "*muslim*". Kata *moor* berasal dari bahasa latin, *mauriscor* adalah istilah yang seringkali digunakan orang-orang Romawi kuno untuk menyebut penduduk wilayah Aljazair Barat dan Maroko. Ketika kolonial Spanyol tiba

dan berupaya menduduki wilayah Mindanao dan Sulu ternyata mereka menemukan bangsa yang memiliki agama, adat istiadat serta karakteristik yang sama seperti orang *moor* di Aljazair maupun Andalusia (Spanyol). Untuk seterusnya Spanyol lebih sering menyebut muslim Mindanao dan Sulu sebagai bangsa *Moor* atau Moro (Saleeby, 1990:476).

Kedatangan Islam di wilayah Selatan Filipina seperti Mindanao dan Sulu berasal dari sumber tradisi setempat, yaitu jaringan geneologis yang disebut dengan *tarsila*. Sebagaimana halnya sumber-sumber silsilah lainnya, *tarsila* cenderung bersifat mitologis, namun terurai secara kronologis dan runtut dalam menjelaskan asal usul komunitas muslim Moro. Berdasarkan sumber-sumber tersebut maka banyak penulis menilai Mindanao dan Sulu sebagai miniatur proses Islamisasi di Asia Tenggara. Dijelaskan dalam catatan sejarah geneologi *tarsila*, bahwa Islam masuk ke wilayah Filipina bagian Selatan (Mindanao dan Sulu) tepatnya pada tahun 1380 M. Kedatangan saudagar muslim ternyata lebih awal daripada kedatangan kolonial Barat Spanyol, karena Spanyol pertama kali mendaratkan kapal dagangnya tanggal 16 Maret 1521 M yang di pimpin oleh Ferdinand de Magelhand.

Perkembangan Islam di wilayah Mindanao dan Sulu diawali kedatangan saudagar-saudagar yang dipimpin seorang ulama Arab bernama Syarif Auliya Karim al-Mahdum dan Raja Baguinda yang menyebarkan ajaran Islam. Sebutan penyebar Islam di wilayah ini antara lain *Masyaikha*, *Makhdum* dan *Auliya*. Masing-masing kelompok menyatakan diri sebagai orang yang dekat dengan keturunan Nabi Muhamad SAW. Khusus sosok Raja Baguinda dari catatan sejarah beliau datang lebih belakangan setelah perkembangan Islam di Sumatra Barat berjalan intensif, mengingat Raja Baguinda adalah seorang pangeran dari keturunan raja-raja Pagaruyung Sumatra Barat. Raja baguinda datang ke wilayah

Mindanao karena untuk menghindari serangan Kerajaan Hindu-Budha Majapahit yang saat itu menyerang Sriwijaya. Ia tiba di kepulauan Sulu setelah 10 tahun mendakwahkan Islam di kepulauan Zamboanga dan Basilan. Atas hasil usaha Raja Baguinda akhirnya raja terkenal Maguindanao, Kabungsuhan Maguindanao memeluk Islam, dan dari tahap inilah proses islamisasi di wilayah ini terus berlanjut. Pada masa pemerintahan sultan Kabungsuhan Maguindanao, telah diperkenalkan sistem hukum Islam seperti tertuang dalam *Maguindanao Code of Law* atau *Luwaran*, yang didasarkan pada kitab-kitab sumber rujukan umumnya hampir sama dengan bermazhabkan *Syafi'i* (Fiqih) dan *Sunni* dari sisi (Kalam). Hal ini bisa diketahui sumber rujukannya seperti *Fathul Qareeb*, *Taqreeb al-Intifaaq*, *Fath al-Mu'in* dan kitab *Mir'au al-Thulab* (Saleeby, 1990).

Islam berkembang di wilayah selatan Fhilipina seperti Davao (sebelah tenggara pulau Mindanao); Kepulauan Lanao dan Zamboanga Utara pada saat Raja Baguinda menjadi orang yang berkuasa di kawasan tersebut. Sepanjang garis pantai kepulauan Filipina semuanya berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin Islam yang bergelar Datu (Datuk) atau Raja. Menurut penjelasan Cesar Adib Majul bahwa meskipun terdapat perbedaan mencolok dalam hal penerapan tradisi kebudayaan dan hukum adat istiadat setempat, masyarakat muslim Filipina cenderung memiliki struktur sosial yang serupa. Seringkali struktur sosialnya merupakan warisan kulutral yang terus dipertahankan sejak sebelum mereka menganut Islam. Seperti penggunaan sistem kekuasaan Datu (Datuk) atau Raja, yakni penguasa lokal (Majul, 1984:26). Pada saat mereka menjadi muslim, beberapa Datu atau Datuk yang dianggap memiliki kekuasaan yang kuat diberi gelar "*sulthan*". Sampai sekarang meskipun sudah berkurang otoritasnya, sistem kekuasaan datu (datuk) ini masih dipertahankan sebagian masyarakat muslim Filipina.

Kemudian berdiri kesultanan Sulu di wilayah Selatan Filipina setelah kesultanan Maguindanao. Berdirinya kesultanan ini merupakan langkah penting dalam tradisi sejarah politik suku *Tausog*. Kekuasaan Sultan Sulu dimulai sejak tahun 1450 M yang dipimpin oleh Sultan Syarif Abu Bakar, sampai akhirnya kekuasaan ini berakhir pada tahun 1915 seiring kuatnya tekanan politik kekuasaan kolonial Amerika. Hal ini berarti kekuasaan kesultanan Sulu bisa bertahan hingga 500 tahun. Namun sebagian ahli sejarah percaya bahwa kesultanan sebagai suatu sistem baru mengalami kejatuhan sejak tahun 1936 M. Ketika persemakmuran menolak untuk mengakui setiap pewaris yang menentang kekuasaan sultan Jamalul II terakhir berkuasa. Formasi komunitas politik yang terorganisir sebagai hasil dari unifikasi *banua* (komunitas) yang terpusat memberikan sumbangan berharga bagi suku Tausog di kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu bukan hanya melingkupi masyarakat suku Tausog, tetapi juga mengendalikan beberapa suku lainnya seperti suku Samal, Yakanes, Badjaus yang muslim, termasuk suku-suku yang terletak di wilayah Zamboanga dan Basilan (Bakar, 1993:199). Kesultanan Sulu juga berperan dalam mengambil legitimasi kekuasaan dari tradisi sebagai bagian dari wilayah *Daar al-Islam*, yaitu wilayah yang berupaya untuk menerapkan syariat Islam dan hukum Islam.

Menurut Cesar A. Majul, dalam "*The Role of Islam In The History of Filipina People*", membagi dua pendekatan tentang keberadaan sulthan muslim di bagian selatan terutama Kesultanan Sulu dan Mindanao. *Pertama*, memberikan tekanan pada perkembangan politik mereka sejalan dengan garis kerajaan dan perkembangan lembaga-lembaga pribumi, sambil menela'ah hubungan mereka dengan kerajaan tetangga sebagai bentuk hubungan dengan luar negeri. *Kedua*, pendekatan yang memandang raja-raja sebagai bagian dari konstelasi yang lebih luas dari sulthan dan raja-raja yang sebenarnya bagian

dari *daar al Islam*, sebagai prasarat dari sebuah sistem kekuasaan Islam saat itu (Majul, 1980:9).

Pada saat masuknya kolonial Spanyol ke Filipina pada tanggal 16 Maret 1521 M, penduduk muslim telah mencium adanya maksud lain di balik ekspedisi ilmiah Ferdinand de Magelhands. Ketika kolonial Spanyol menaklukkan wilayah Utara Filipina tidak banyak perlawanan berarti dari wilayah tersebut. Tetapi ketika mereka berusaha menaklukkan wilayah Selatan Filipina seperti Mindanao, Sulu, Basilan, Cotabato, Lanao Selatan, Lanao del Norte ternyata penduduk muslim melakukan perlawanan dengan gigih dan tanpa henti menyerah, karena didasari oleh semangat *Jihad fi Sabilliah*, dan perlawanan ini berjalan hingga tahun 1876 M. Kolonial Spanyol menghabiskan waktu tidak kurang 375 tahun untuk melawan dan menaklukkan kelompok muslim Selatan Filipina, namun hal ini umat Islam tetap tidak dapat ditaklukan, hingga berpindah kekuasaan kolonial Spanyol kepada Amerika.

Menurut Cesar Adib Majul adanya konflik antara muslim Moro dengan koloni Spanyol lebih dominan dilatarbelakangi oleh perebutan pengaruh agama (*Gospel*) ketimbang faktor-faktor lain seperti ekonomi (*gold*) dan politik (*glory*), sehingga munculnya "*perang Moro*". Majul menegaskan bahwa perang ini seperti ada benang merah dan kelanjutan dari perang Salib antara kekuasaan Islam dengan Eropa.

Menarik studi yang dilakukan George C. Decassa, seorang rohaniwan (pendeta) Katolik Filipina, dalam disertasinya yang berhasil dipertahankan di Universitas Gregoriana Roma Italia, tentang gerakan *jihad fisabilliah* penduduk Muslim Filipina Selatan, Menurut Decassa, makna yang terkandung dalam kata *umat* bisa sangat ideologis dan bernuansa politis, tergantung pada kondisi dan sisi pandangannya. Salah satu tantangan terberat yang dialami umat muslim Filipina sejak zaman kesultanan sampai

pasca kolonial, bagaimana upaya mereka mempertahankan identitas umat Islam lokal dan muslim pada umumnya. Respon yang diberikan sangat dipengaruhi oleh konsep *umat* dalam teks Al-Quran, namun istilah itu diterjemahkan dalam konteks Islam di Filipina. Lebih jelas lagi menurut Decassa, konsep *umat* tidak lagi sepadan dengan kenyataan geografis kenegaraan terkini, artinya dalam pandangannya, seorang muslim bisa saja menjadi bagian dari masyarakat politik apapun dan dimanapun sesuai dengan pilihannya. Bahkan bagi seseorang tidak ada lagi makna yang dapat dipertahankan dari konsep masyarakat tradisional Islam seperti juga konsep *daar al Islam* dan *daar al barbi*".

Pada masa penjajahan Spanyol kerap kali demi tercapainya tujuan kolonialisasi, mereka menggunakan berbagai cara diantaranya *divide and rule* (pecah belah dan kuasai) bersamaan itu digencarkan pula *mission sacre* (misi kristenisasi) terhadap penduduk muslim Moro di wilayah selatan Filipina. Orang-orang muslim *distigmatisasi* (diberi julukan yang berkonotasi buruk dan rendah) yaitu sebagai "*moor*" (Gowing, 1984:187-188), (Moro) yang artinya orang yang buta huruf, jahat, tidak bertuhan dan tukang bunuh. Sebenarnya bagi muslim Moro, perlawanan mereka bertujuan mempertahankan dan melindungi integritas teritorial dan independensi wilayah kesultanan (*daar al Islam*), dimana Mindanao dan Sulu adalah berada dalam kekuasaan Melayu Muslim.

Penjajahan Spanyol bisa dikatakan berhasil menguasai wilayah Utara Filipina, tetapi dapat dikatakan gagal menundukkan wilayah Selatan terutama yang tergabung dalam Kesultanan Mindanao dan Sulu, meski dalam kurun waktu yang lumayan lama (375 tahun). Pada saat terjadinya kekalahan dalam perebutan pengaruh dengan koloni Amerika, pada tahun 1898 M Spanyol menjual wilayah jajahannya baik di Utara dan Selatan Filipina kepada Amerika seharga USS 20 Juta melalui

perjanjian *traktat Paris*. Jajahan Amerika saat mengawali ekspansi dan kolonialisasi di wilayah Selatan Filipina menampilkan gerak langkah seperti bersahabat dan dapat dipercaya akan janji-janjinya. Hal ini diperkuat dengan ditandatanganinya *traktat Bates* tanggal 20 Agustus 1898 M, yang isinya Amerika bertekad akan memberikan kebebasan beragama, kebebasan menyampaikan aspirasi dan meningkatkan tarap pendidikan bangsa Moro. Namun kenyatannya traktat tersebut hanya dijadikan alat taktis untuk mengambil hati orang muslim agar tidak melakukan pemberontakan dan perlawanan pada koloni Amerika.

Kesultanan Mindanao dan Sulu pada dasarnya tidak terpengaruh dengan penetrasi kolonialisme baik Spanyol maupun Amerika. Namun ironisnya Filipina adalah negara paling lama dijajah Eropa di wilayah Asia Tenggara. Kolonialisasi Spanyol dan Amerika berusaha melakukan integrasi politik formal dengan Filipina Utara dan Selatan dalam banyak aspek seperti bidang sosial, budaya, pendidikan, pemerintahan, hukum dan lainnya. Sedangkan saat memasuki kemerdekaan Filipina dan hilangnya pengaruh kolonialisme ternyata pemerintahan Filipina yang terbentuk berupaya melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh koloni Amerika dengan semboyan *Filipinisasi* dan *Kristenisasi*. Hal inilah yang menyebabkan kegelisahan di kalangan muslim Moro yang berada di Wilayah Selatan Filipina baik di masa awal kemerdekaan hingga saat ini.

Setelah dibuatnya *traktat Bates* oleh Amerika tahun 1898 M, maka Amerika dengan gencar berusaha menerapkan sistem politiknya di wilayah selatan, padahal eksistensi kesultanan Mindanao dan Sulu belum mampu ditaklukkan oleh Spanyol. Memasuki tahun 1914-1920 M, Amerika semakin kuat melakukan tekanan bagi muslim Moro dengan menerapkan beberapa kebijakan,

Kebijakan, **pertama**, kebijakan sistem agraria (pertanahan) baru. Di antara bentuk kebijakan pertanahan itu antara lain kebijakan *Land Registration Act* no. 496 (1902 M) yang menyatakan keharusan mendaftarkan tanah milik pribadi kepada pemerintahan kolonial Amerika dalam bentuk tertulis ditandatangani dan di bawah sumpah. Kemudian kebijakan hukum tanah *Philippine Commission Act* no. 718 tanggal 4 April 1903M, yang menyatakan hibah tanah dari para Sultan, Datuk atau Kepala Suku Non-Kristen sebagai tidak sah, jika dilakukan tanpa ada wewenang atau izin dari pemerintah (Abdullah,1983). Demikian pula *Land Act* no.296 diberlakukan 7 Oktober 1903M, yang menyatakan semua tanah milik pribadi yang tidak didaftarkan sesuai dengan *Land Registration Act* no 496, maka status tanah tersebut adalah tanah negara. Kemudian ada pemberlakuan kebijakan hukum yang sangat memberatkan lagi, yaitu *The Mining Law of 1905* yang menyatakan bahwa semua tanah yang telah diakui milik negara di Philipina sebagai tanah yang bebas terbuka untuk dieksplorasi.

Kemudian beberapa tahun kemudian muncul pula pemberlakuan kebijakan pertanahan *Quino-Recto Collonialization Act* no. 419 pada 12 Februari 1935M, menandai upaya pemerintahan koloni Amerika yang lebih agresif untuk membuka tanah yang dianggap milik negara, dengan kata lain menjajah Mindanao dan Sulu. Pemerintah berkonsentrasi pada pembangunan jalan dan survei-survei tanah negara, lalu membuka pemukiman besar di Selatan untuk menampung ribuan pemukiman Kristen, dari wilayah Utara khususnya dibangun di Provinsi Cotabato lama. Bahkan senator Emanuel L. Quezon 1936–1944 M mengkampanyekan program pemukiman besar-besaran orang-orang dari proses migrasi orang-orang Utara ke Selatan dengan tujuan menghancurkan homogenitas dan keunggulan bangsa Muslim Moro di Mindanao serta berupaya untuk

mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Philipina Utara secara umum. Pada prinsipnya ketentuan hukum tentang tanah tersebut merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum muslim (tanah adat dan tanah ulayat) oleh pemerintah kolonial Amerika. Kepemilikan tanah bagi penduduk Utara untuk di wilayah selatan dipermudah oleh Amerika untuk mendorong terjadinya migrasi penduduk Utara ke selatan semakin banyak, hal ini disebabkan adanya motif untuk mendapatkan tanah.

Kebijakan **Kedua**, koloni Amerika membentuk propinsi *Moro Land*, dengan alasan untuk memberikan arah pembentukan sistem masyarakat modern (*civilizing*) bagi bangsa Moro. Akibatnya perlawanan tidak dapat dihindarkan oantara orang muslim melawan koloni Amerika. Menurut Teofisto Guingoana sejak tahun 1914-1920 terjadi 19 kali pertempuran besar yang dilakukan bangsa Moro menolak dua kebijakan tersebut. Perlawanan itu terinspirasi oleh penduduk Moro dengan semangat *jihad fi sabillah*. Ketidakmampuan muslim Moro untuk membendung tekanan yang dilakukan Amerika, maka sejak tahun 1920-an itulah seluruh wilayah Selatan Filipina yang berada di bawah kesultanan Mindanao dan Sulu takluk di bawah koloni Amerika dan dikendalikan oleh gubernur orang Amerika, kecuali wilayah Lanao Selatan dan Lanao del Sure. Terdapat pula wilayah seperti Sulu, Zamboanga dan Cotabato gubernurnya dipercayakan kepada orang-orang kristen dari wilayah Filipina Utara (Gomez, 1992:38-40). Strategi Amerika meredam perlawanan muslim Moro ternyata tidak cukup efektif, karena itu selain dua kebijakan di atas juga diterapkan pada aspek pendidikan dan penerapan sistem hukum, sehingga norma-norma yang mengikat bagi warga negara cenderung tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Seiring dengan melemahnya perlawanan muslim Moro karena kekuasaan Sulthan semakin berkurang

bahkan hilang karena masuknya arus kekuasaan pemerintahan Manila di bawah bayang-baynag koloni Amerika. Langkah ini bisa mengancam kekuasaan umat Islam secara bertahap dan berpindah pada kekuasaan pemerintah Manila sehingga kemadirian Muslim Moro semakin tergerus.

Ditinjau dari aspek politik, pada masa pemerintahan kolonial Spanyol, Amerika dan pemerintahan Filipina merdeka, tampak adanya tekanan dan pergeseran kekuasaan yang melibatkan gereja, yang dalam waktu bersamaan terjadi proses kristenisasi di wilayah Utara termasuk juga wilayah Selatan yang sebenarnya sejak awal berbasis Islam. Fusi antara peran pemerintahan transisi Amerika-Manila dengan peran gereja katolik, walaupun tak tampak dalam kelembagaan struktural pemerintahan, namun akan tampak jelas bagaimana gereja ikut memainkan peran politik dengan mengatasnamakan upaya integrasi nasional dan secara pelan-pelan menghilangkan peran homogenitas kultural Muslim di wilayah Selatan Filipina.

Setelah berlangsung pemerintahan transisi Manila-Amerika, tepat pada tanggal 4 juli 1946 Filipina mendapatkan kemerdekaan dari Amerika dengan nama Republik Filipina, yang merujuk pada nama Philip II, raja Spanyol ketika awal penjajahan pada abad ke 16 M. Kemerdekaan tersebut tidak banyak memberikan makna bagi muslim Moro, karena keluarnya koloni Amerika dari kawasan Filipina, ternyata muncul model penindasan baru yaitu pemerintahan Filipina Merdeka, karena pada kenyataannya mereka berusaha melanjutkan program integrasi nasional, politik agraria, pemindahan orang Utara ke wilayah selatan sehingga penindasan dan diskriminasi minoritas muslim masih terjadi saat memasuki Filipina Merdeka (Lingga, 1980). Pemerintah Filipina memandang sejarah bangsa Moro merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan geopolitik Filipina secara keseluruhan, setidaknya setelah hilangnya koloni

Barat dari wilayah itu. Dalam ilustrasi yang digambarkan oleh tokoh Moro National Libration Front (MNLF), Abbound Lingga “*meskipun Muslim Moro mendapatkan tempat “dalam Rumah” secara fisik di Filipina saat memasuki Filipina Merdeka, tetapi seringkali muslim Moro tidak mendapatkan rasa aman, tentram dan tidak ada kemandirian atau kewenangan untuk mengatur wilayah muslim secara otonom*”. (Gomez, 1992:38-40).

2. Perjuangan Muslim Moro

Perjuangan Muslim Moro secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua bagian. **Pertama**, kelompok *moderat* yang didukung oleh mayoritas penduduk, karena mereka berusaha untuk mempertahankan hidup sebagai komunitas muslim tetapi pada sisi lain mereka terpaksa hidup dalam sistem politik yang dikendalikan pemerintahan Manila merdeka. Meskipun kemerdekaan tersebut tidak banyak memberikan makna bagi muslim Moro, karena keluarnya koloni Amerika dari kawasan Filipina, ternyata muncul model tekanan baru dari pemerintahan Filipina Merdeka, karena kenyataannya mereka masih melanjutkan program integrasi nasional, (politik agraria, pemindahan orang Utara ke wilayah selatan sehingga penindasan dan diskriminasi) kepada minoritas muslim. Konsekuensinya, muslim Moro berusaha melawan dan berjuang bahkan kadang mengangkat senjata untuk menuntut hak mereka dalam banyak hal sebagai warga negara, tindakan dan perlawanan yang dilakukan kelompok Muslim Moro ini masih dalam cara-cara yang elegan, legal dan konstitusional. Walaupun dalam beberapa peristiwa mereka memanggul senjata demi menuntut hak mereka. Kelompok pertama ini lebih sering dikenal dengan kelompok *pro-integrasi* dan memperjuangkan otonomi di wilayah Moro (Abdullah, 1980:355).

Kelompok **kedua**, sering disebut dengan kelompok *radikal*, karena mereka berusaha memperjuangkan kemerdekaan dengan cara-cara menarik

perhatian dunia internasional, khususnya negara-negara Islam tentang nasib mereka yang masih tertindas dan ditekan di alam negara merdeka. Langkah-langkah lain yang mereka lakukan adalah dengan melakukan perlawanan melalui perang gerilya, tujuannya untuk melemahkan pemerintahan Filipina (Ensiklopedi, 2003:480). Sebenarnya dengan terbagi-bagi pada kelompok-kelompok faksi muslim di Selatan ini, semakin memperlemah posisi perjuangan Muslim Moro di hadapan pemerintah Filipina.

Perjuangan muslim Moro setelah memasuki babak baru Filipina merdeka, secara terorganisir paling awal lahir di tahun 1968 M dengan nama *Muslim Independent Movement* (MIM). Gerakan pembebasan muslim Moro MIM lahir sebagai akibat dari tekanan yang semakin berat dari pemerintah Filipina pimpinan presiden Ferdinand Marcos yang berkuasa dari tahun 1965-1986 M. Ia seringkali mengeluarkan kebijakan yang cenderung represif dan bertindak otoriter terutama bagi penduduk muslim Moro. MIM didirikan oleh seorang politisi muslim Uldog Maltalan. Organisasi ini tidak dapat bertahan lama karena mendapat tekanan dari pemerintah. Kemudian muncul organisasi perjuangan kemerdekaan muslim Moro dengan nama *Moro Libration Front* (MLF) pada tahun 1971 yang tak bisa dilepaskan dari sikap politik Marcos yang lebih otoriter apalagi pada masa itu di keluarkan kebijakan *Presidential Proclamation* no. 1081. Sejak saat itu perjuangan muslim Moro terus berbenah, meskipun banyak pula mengalami perubahan-perubahan mendasar karena adanya perbedaan ideologi dan langkah-langkah perjuangan. Dari organisasi MLF ini lahir pula organisasi perjuangan muslim Moro seperti *Anshor el Islam*; *Moro national Libration Front* (MNLF) pimpinan DR. Nur Misuari ; *Moro Islamic Libration Front* (MILF) dipimpin oleh Hasyim Selamat (Yunanto, 2003).

Moro Islamic Libration Front (MILF) adalah organisasi perlawanan muslim Moro pimpinan Salamat Hasyim. MILF memisahkan diri dari MNLF (Moro National Liberation Front) pimpinan Nur Misuari, sejak 1984. Nur Misuari dianggap tidak mampu menyampaikan aspirasi mayoritas muslim Moro lantaran telah melakukan penandatanganan kesepakatan dengan pemerintah Manila, tanpa satupun penyelesaian prinsipil bagi bangsa Moro. Hingga kini, MILF tetap berjuang menghendaki tegaknya negara Islam yang merdeka dan bisa menentukan nasibnya sendiri, meskipun pergerakan MILF dan Abu Sayyaf sama-sama menginginkan berdirinya negara Islam, namun MILF tidaklah se-ektrim dan radikal seperti Abu Sayyaf.

Namun menyusul perundingan yang difasilitasi oleh pemimpin Libya, Muammar Qadafi, MNLF setuju untuk meletakkan senjata pada tahun 1976. Keputusan petinggi MNLF untuk menerima gencatan senjata tidak diterima oleh semua anggota MNLF. Maka, mereka yang masih ingin melanjutkan perjuangan bersenjata lalu membelot dari MNLF & membentuk kelompok baru yang bernama *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) pada tahun 1981 dengan Hashim Salamat sebagai pemimpinnya. Dibandingkan dengan MNLF, MILF cenderung lebih radikal karena memprioritaskan opsi perjuangan bersenjata untuk menggapai tujuannya. MILF juga memiliki cita-cita menjadikan Filipina selatan sebagai negara merdeka yang berbasis hukum Islam. Tahun 1987, MNLF menerima tawaran dari pemerintah Filipina untuk menjadikan sebagian Pulau Mindanao, Filipina selatan, sebagai daerah otonomi khusus. Daerah otonomi yang dimaksud sendiri baru secara resmi didirikan pada tahun 1990 dengan nama resmi "*Nagsasariling Rehiyon ng Muslim sa Mindanan*" (NRMM; Daerah Otonomi Muslim Mindanao)" (Powel, 2010). Jika MNLF menerima opsi daerah otonomi, maka tidak demikian dengan MILF yang menolak meletakkan senjata selama

daerah Filipina selatan masih belum menjadi negara sendiri. Konflik bersenjata di Filipina selatan pun sebagai akibatnya masih tetap berlanjut.

NRMM "*Nagsasariling Rehiyon ng Muslim sa Mindanan*" (NRMM; Daerah Otonomi Muslim Mindanao) dibentuk melalui keputusan Republik Filipina 6734 (*Republik Act 6734*) pada bulan agustus 1989 berdasarkan perjanjian Tripoli tahun 1976. Perundingan-perundingan antara pemerintah Filipina dengan MNLF (*The Moro National Libration Front*) daritahun 1992-1996 akhirnya menyetujui pembentukan pemerintahan otonom Filipina Selatan. Pemerintahan otonomi bagi muslim Moro di Mindanao ini meliputi 13 propinsi serta 14 kota dan desa yang berada di wilayah : Maguindanao; Lanao del Sure; Sulu; Basilan; Tawi-Tawi; Zamboanga del Sur; Zamboanga Del Norte; North Cotabato; South Cotabato; Sultan Kudarat; Lanao del Nrt; Davao del Sur dan Palawan (Yunanto, 2003).

Pada tahun 1981 MNLF pimpinan Nur Misuari yang secara keanggotaan mendapat dukungan mayoritas Muslim Moro, ternyata pecah kembali karena alasan perbedaan ideologi perjuangan di mana gerakan ini dianggap sebagai kelompok nasionalis sekuler dan tidak mampu mengangkat harkat martabat umat Islam di hadapan pemerintah. Kelompok yang keluar dari MNLF Nur Misuari ini dipimpin Dimas Pundato dengan membentuk organisasi perjuangan baru dengan nama *Moro national Libration Front Reformation* (MNLF Reformasi) tahun 1981. Organisasi ini berjuang secara legal konstitusional menuntut otonomi dengan semangat Islam yang mendasarinya. Namun organisasi ini tidak mampu mendapat dukungan dari kelompok muslim Moro secara mayoritas, karena MNLF pimpinan Nur Misuari sejak tahun 1980-an telah merapatkan diri dengan pihak pemerintah Filipina untuk melakukan perundingan, mengingat dalam beberapa kali diadakan perundingan yang dimediasi oleh ASEAN maupun

liga Arab pihak Nur Misuari lah satu-satunya kelompok muslim yang diundang.

Sikap kelompok Modernis seperti MNLF pimpinan Nur Misuari mengindikasikan adanya kemauan untuk belajar dari pengalaman demokrasi yang terus berkembang di berbagai penjuru dunia. MNLF akhirnya memperlunak tuntutan yang semula merdeka menjadi ke arah otonomi bagi wilayah yang didiami mayoritas Muslim terutama Selatan seperti Mindanao, Basilan, Sulu, Palawan, dengan luas geografisnya sekitar 116.895,3 KM2. Berbagai kompromi-kompromi politik terus dilakukan di meja perundingan. Pada tanggal 23 Desember 1976 MNLF menandatangani perjanjian Tripoli dan disetujui pemerintah Filipina. Perjanjian ini dilakukan empat negara sebagai mediasi dan disaksikan sekjen Konferensi Islam. Namun sayang dalam implementasi perjanjian itu diwarnai aksi pembekuan oleh pemerintah Filipina yang saat itu dipimpin oleh presiden Ferdinand Marcos.

Ferdinand Marcos gagal menjalankan Tripoli karena kurangnya komitmen politik dari pemerintah pusat di Malacanang. Setelah pemerintahan Marcos berakhir tahun 1986, penerusnya yaitu presiden Corazon Aquino mencoba untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Memang jelas dalam pasal X, Bab 15-21 dari undang-undang Filipina (konstitusi) memuat aturan tentang wilayah otonomi. Pada pemerintahan Aquino NRMM "*Nagsasariling Rehiyon ng Muslim sa Mindanao*" (NRMM; Daerah Otonomi Muslim Mindanao) dilaksanakan dengan maksimal. Proses pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1989 dan akhirnya terpilih Nur Misuari (dari MNLF) sebagai Gubernur daerah otonomi wilayah Selatan atau NRMM (Tumbaga, 1999).

Kemudian terjadi pula perundingan damai yang dimediasi oleh ASEAN pada tanggal 30 Agustus 1996 di Istana Merdeka Jakarta antara Ketua MNLF Nur Misuari dengan Presiden Fidel

Ramos yang isinya bertujuan meredakan konflik antara pemerintah dengan pihak muslim Moro. Namun realisasi perjanjian itu ternyata masih menunjukkan ketidakpastian nasib bangsa Moro karena masih berlanjutnya ketegangan dengan kedua belah pihak. Di satu sisi pihak muslim Moro menghendaki diselesaikannya dengan cara diplomatik di wakili *Moro national Libration Front* (MNLF) pimpinan DR. Nur Misuari, sementara di pihak lain menghendaki perjuangan dengan tetap mengangkat senjata (*jihad*) yang dipimpin oleh kelompok *Moro Islamic Libration Front* (MILF) oleh Hasyim Selamat (Yunanto, 2003). Akhirnya pemerintah Filipina tetap dengan tindakan represif dengan pendekatan militer di wilayah basis muslim dengan alasan menumpas kelompok radikal MILF (Nugroho, 1996). Semua kelompok memandang caranyalah yang paling efektif dan tepat untuk menyelesaikan konflik bangsa Moro, sedang mereka berjalan sendiri-sendiri sehingga amat mudah dipatahkan dan dikendalikan pemerintah. Sedangkan pihak pemerintah Filipina (Fidel Ramos) hanya memilih satu diantara beberapa kelompok yang ada untuk dirangkul dan diajak berunding, Sementara beberapa kelompok lain sengaja ingin ditumpas dan tidak ikut dilibatkan di dalam perundingan-perundingan.

Pada tahun 1997, untuk pertama kalinya perwakilan MILF & Filipina terlibat dalam perundingan resmi tidak terkecuali kelompok MNLF Nur Misuari. Beberapa kali perundingan antara keduanya sukses menghasilkan kesepakatan damai. Namun beberapa kali pula kesepakatan damai tersebut gagal membawa perdamaian jangka panjang akibat pecahnya kembali aksi-aksi kekerasan bersenjata. Lepas dari itu semua, toh pada tahun 2013 perwakilan MILF & Filipina mengklaim kalau keduanya berhasil merumuskan perjanjian damai yang diharapkan bisa mengakhiri aktivitas pemberontakan MILF secara permanen. Berdasarkan kesepakatan di tahun 2013 tadi, wilayah

Filipina selatan akan memperoleh otonomi lebih luas & kebebasan menggunakan hukum Islam. Kesepakatan tersebut juga menjanjikan jatah keuntungan hasil eksploitasi SDA yang lebih besar bagi komunitas setempat. Sebagai gantinya, MILF setuju untuk mengesampingkan ide kemerdekaan Filipina selatan & membiarkan senjatanya dilucuti. Bulan Januari 2014, kesepakatan damai tersebut akhirnya diresmikan di Kuala Lumpur, Malaysia

3. Pergerakan Abu Sayyaf (bapak pedang)

Sejak tahun 1993 lahir pula organisasi pergerakan Muslim Moro dari tubuh MILF yang dikenal dengan kelompok Abu Sayyaf (Bapak Pedang). Gerakan kelompok terakhir ini cenderung radikal dan bertindak di luar norma agama Islam karena mengarah pada tindakan ekstrim, apalagi basis perjuangan mereka sengaja berada dalam hutan.

Pergerakan kelompok Abu Saayaf (*bapak pedang*) adalah nama sebuah kelompok separatis militer yang berbasis Islam. Basis perjuangannya berada di wilayah Basilan, Mindanao dan Jolo. Kelompok Abu Sayyaf dalam banyak sumber sering disebut teroris karena perjuangannya berideologikan Islam garis keras. Kelompok ini memiliki seorang pimpinan yang dijuluki Khadafi Janjalani (<https://unik6.blogspot.co.id/2016/03/abu-sayyaf.html>). Nama Abu Sayyaf sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni *Abu* yang berarti pemegang, dan *sayyaf* yang berarti pedang. Jadi *abu sayyaf* adalah sebuah kelompok pemegang pedang. Para anggota kelompok *abu sayyaf* umumnya pernah dilatih di kamp-kamp militer baik di hutan-hutan wilayah basis persembunyian mereka di Selatan Filipina maupun sampai di Afganistan. Gerakan Abu Sayyaf adalah pergerakan Islam yang bersifat radikal, di mana gerakan ini selalu menggunakan kekerasan dalam setiap aksinya. Gerakan Abu Sayyaf di Filipina ini telah sangat meresahkan masyarakat Filipina

khususnya dan masyarakat regional Asia Tenggara umumnya dengan aksi kekerasan, penculikan, pengeboman, eksekusi terhadap sandera dan lainnya. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan ini sudah dikelompokkan pada tarap terorisme.

Sejak MNLF meletakkan senjata pada tahun 1977, MILF merupakan satu-satunya kelompok bersenjata anti-pemerintah yang aktif di Filipina selatan. Namun situasinya berubah setelah pada tahun 1993, sebagian anggota MILF yang dipimpin oleh Abdurazak Abubakar Janjalani keluar dari keanggotaan MILF & mendirikan kelompok baru yang bernama "*Abu Sayyaf*" (pembawa pedang). Dibandingkan dengan MILF, Abu Sayyaf mengusung metode perjuangan yang lebih radikal karena para anggota Abu Sayyaf tidak segan-segan melakukan penculikan warga sipil untuk mendapatkan tebusan. Metode yang lantas membuat kelompok tersebut sama-sama dimusuhi oleh pemerintah Filipina & MILF (Powell, 2010).

Kelompok pergerakan Abu Sayyaf pertama muncul dideklarasikan pada tahun 1989 dibawah kepemimpinan Abdurazak Janjalani, ia pernah menempuh pendidikan di Universitas Ummul Qura Makkah selama tiga tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia kembali ke Basilan dan Zamboanga untuk memulai berdakwah di Filipina tahun 1984 (www.kabarmakkah.com/2016/03/siapa-sebenarnya-abu-sayyaf-bapaknya.html+&cc=10&hl). Kemudian pada tahun 1987 ia mengunjungi Libya, selanjutnya bersama-sama mujahidin lain melawan Uni Soviet di Afganistan. Sehingga ia memiliki jaringan dengan kelompok fundamentalis Islam lain. Makanya sejak tahun 1980 Janjalani sudah memiliki ide tentang pembentukan negara Islam "*Islamic Theocratic State of Mindanao* (MIS), dan mencoba menanamkan ideologi agama yang intoleransi dengan tujuan untuk menyebarkan Islam melalui *jihad*. Sedangkan target utama

kelompok ini adalah umat kristen Filipina.

Kelompok Abu sayyaf dari segi kuantitas sangatlah kecil, dan kelompok separatis Islam yang sangat radikal. Mereka menggunakan kekerasan, penculikan, pengeboman, eksekusi terhadap sandera, pemerasan untuk mengupayakan berdirinya sebuah negara “*Islam Mindanao Islamic State*” (MIS) yang merdeka. Basis pergerakan ini terletak di sebelah Barat Mindanao, Basilan, Jolo dan Sulu yaitu di selatan Filipina karena mayoritas Muslim mendiami wilayah ini.

Kelompok Abu Sayyaf mulai banyak dibicarakan. Konon, mereka menyempal dari kelompok perjuangan MNLF (Moro National Liberation Front) pada tahun 1991. Pendiriannya adalah Abdurrajak Janjalani kemudian tewas dalam sebuah serangan polisi pemerintah Philipina pada tahun 1998. Tapi kematian Abdurrajak tak berpengaruh pada gerakan Abu Sayyaf. Kepemimpinannya digantikan oleh adiknya, Khadafy Janjalani. Pasukan Abu Sayyaf diperkirakan memiliki basis pertahanan di kepulauan Basilan, Sulu, Tawi Tawi yang terletak di bagian paling selatan Filipina. Tahun 1993 Abu Sayyaf menculik Charles Walton, 61, asal Philadelphia. Walton adalah ahli bahasa pada *Summer Institute of Linguistic* yang berbasis di AS dan menerjemahkan Injil ke dalam bahasa setempat. Ia dibebaskan setelah 23 hari disekap. Tahun berikutnya, mereka menculik lagi tiga orang biarawati dan seorang pendeta Spanyol dalam serangan terpisah. Pada 1998, korban mereka meliputi dua pria Hong Kong, seorang warga Malaysia dan Taiwan. Kali ini, ketika mereka menyekap sejumlah sandera di Basilan, mereka menuntut pemerintah Manila agar melakukan usaha membebaskan Ramzi Yusuf seorang anggota mereka yang ditahan di AS karena dituduh mendalangi pemboman *World Trade Centre*, New York, pada 1993 www.kabarmakkah.com/2016/03/siapa-sebenarnya-abu-sayyaf-bapaknya.html+&ccd 10&hl). Tindakan-tindakan radikal seperti itu terus

berlanjut hingga sekarang yang motifnya selain tidak kooperatif dengan pemerintah, untuk mendapatkan dana dalam perjuangannya, dan anti terhadap umat kristiani.

Tujuan pergerakan Abu Sayyaf ini adalah untuk mendirikan negara Islam MIS (*Islam Mindanao Islamic State*) yang merdeka dan berupaya menerapkan hukum syariah Islam sebagai otoritas moral dari Undang-undang negara. Rommel Banlaoi menjelaskan mengenai “*empat dasar Kebenaran*” yang dideklarasikan oleh Abdurazak Janjalani tahun 1993-1994 M sebagai panduan dasar bagi perjuangan kelompok Abu Sayyaf : *pertama*, Tujuan kami tidak untuk membangun atau mempermosikan faksi, dan perpecahan dalam kelompok perjuangan Muslim, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan kelompok Abu Sayyaf adalah untuk menjembatani antara pasukan revolusioner baik di MNLF maupun MILF yang peran dan kepemimpinannya dalam perjuangan ini tidak dapat diabaikan. *Kedua*, Tujuan strategis kami adalah pembentukan sebuah negara Islam murni, yang “*sifat, makna, lambang dan tujuannya*” identik dengan perdamaian. Kelompok abu Sayyaf menyatakan bahwa mereka akan menghormati kebebasan beragama bahkan dalam konteks negara Islam. Mereka menyatakan “*bak-bak orang Kristen akan dilindungi selama mereka mematuhi hukum negara Islam*” (www.kabarmakkah.com/2016/03/siapa-sebenarnya-abu-sayyaf-bapaknya.html+&ccd 10&hl).

Ketiga, Advokasi melalui tindakan peperangan merupakan kebutuhan selama tetap terjadi “*penindasan, ketidakadilan dan klaim yang sewenang-wenang terhadap umat Islam*. *Keempat*., Peperangan mengganggu perdamaian hanya untuk mencapai tujuan yang benar dan nyata akan nilai kemanusiaan, dalam penegakan keadilan dan kebenaran untuk semua dibawah naungan hukum Quran yang mulia dan sunnah yang murni. Selain itu kelompok Abu Sayyaf menyadari adanya ketidakadilan struktural yang terjadi. Ketidakadilan dan perampasan

hak ekonomi bangsa Moro. Kehadiran mereka juga untuk mencari keadilan bangsa Moro. Tujuan untuk penegakan keadilan akan berakhir dengan sebuah tuntutan untuk mendirikan negara Islam yang murni sebagai jaminan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa Moro.

Langkah-langkah yang dilakukan kelompok ini adalah dengan cara merekrut anggota. Kelompok Abu Sayyaf mendekati dan merekrut pemuda-pemuda Islam yang tidak sejalan dengan kelompok MNLF. Awalnya kelompok ini hanya berjumlah 500 orang. Walaupun hanya sedikit kelompok ini dalam gerakannya cenderung radikal dan mampu menggoyahkan kedaulatan negara Filipina. Secara umum pandangan kelompok Abu Sayyaf tentang sejarah mengikuti proses linier risalah (*kenabian*) dengan “*ulama*”. Kelompok ini mencoba membuat garis pemisah antara *haq* (kebenaran) dengan yang terlarang (*haram*), muslim dengan *kafir* (orang yang mengingkari Allah). Konsep tentang keadilan juga didasarkan pada konsep *qishas* (pembalasan) dan ia berpendapat bahwa *jihad* (perang melawan musuh) sebagai cara yang tepat untuk mengeliminir tekanan pemerintah Filipina di Mindanao dan wilayah lain di Filipina Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Muslim Moro di Filipina Selatan berada di wilayah cakupan 13 Propinsi meliputi Mindanao, Sulu, Basilan, Palawan, Balabac, Tawi-Tawi, Cotabato, Cotabato Utara; Lanao Selatan dan Lanao del Norte. Dan Sultan Kudarat. Muslim Moro Filipina Selatan telah berkembang Islam sejak tahun 1380 M dan sejak abad ke 15 M berdiri kekuasaan Sultan Sulu dan Mindanao. Namun tahun 1521 M Kolonial Spanyol menjajah Filipina baik di Utara dan Selatan hingga tahun 1898. karena ada persaingan antar koloni maka perebutan kekuasaan antara Spanyol dan Amerika tak terhindarkan, dan Amerika menang ditandai dengan dibuatnya *Traktat Paris*. Pada masa jajahan Amerika umat Islam mengalami nasib yang amat memprihatinkan karena sejak itu jatuh lah

kesultanan Sulu tepatnya 1936 M. Dua kebijakan yang amat berat itu antara lain masalah politik *agraria* (pertanian) dan pembentukan *Moro Land*.

Sejak Filipina merdeka tahun 1946, nasib muslim Moro di Selatan Filipina belum juga berubah, karena kuatnya tekanan pemerintah Filipina terhadap minoritas Muslim dengan tetap melanjutkan kebijakan yang dibuat pemerintah kolonial Amerika. Maka tahun 1968 muncul pergerakan muslim yang terorganisir *Muslim Independent Movement* (MIM); lalu muncul pula *Moro Liberation Front* (MLF) tahun 1971; pergerakan MLF berganti nama *Moro national Liberation Front* (MNLF) pimpinan DR. Nur Misuari ; dri MNLF sebagian memisahkan diri membentuk *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dipimpin oleh Hasyim Selamat; terakhir tahun 1993 dari MILF muncul pergerakan Abu Sayyaf pimpinan Abdurrazak Janjalani. Munculnya beragam bentuk pergerakan muslim disebabkan terdapat perbedaan ideologi perjuangan ada yang moderat seperti MNLF; MNLF Reformasi; namun terdapat pula yang cenderung radikal seperti MILF bahkan ada yang cenderung ekstrim seperti gerakan Abu Sayyaf.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Taufik, dkk, (ed). (1983), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta : LP3ES
- Adib Majul, Cesar, 1984, *Muslim in The Philippines*, Quezon City : UP Press
- Adib Majul, Cesar, 1980, *The Role of Islam In The History of Filipina People*, Philippines.
- Hilario Molijon Gomez, 1992, *The Muslim Filipina Rebellion and Changes to the Mission and the Ministry of the Cristian Church in Filipines*, Mhicican University
- Nugroho, (1996, Sejarah dan Prospek Perdamaian Di Moro, Laporan Khusus, *Harian Republika*, 22 September 1996.
- Letty Tumbaga, 1999, “The Autonomous Region in Muslim Mindanao : In Crisis?” *Politik, A Magazine for Policymakers*, Vol. 6 No. 1 August 1999,

- Quezon City : The Ateneo Center for Social Policy
- Lingga, Abhound, 1980, *The Struggle of the bangsa Moro people for national Librations*. Cotabato City
- Saleeby, Najeeb M., 1980. *Studies In Moro History*, (Manila : Biro Of Printing, Cetak Ulang)
- Patrich Gardiner, 1971, *The Nature of Historical Exsplanations*, London : Oxford University Press
- Gowing, Peter G., 1984, *Muslim Philipines :Heritage and Horizon*, Quezon City : New day Pubilcations
- Powell, A.. 2003, "*The Mindanao Conflict: Ethnic Tensions in the Southern Philipines*". 2010
- Seni Mudmaran, 1993, “Negara, Kekerasan Dan Bahasa”, dalam buku *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tneggara*, Jakarta : LP3ES
- Yunanto, Y, et. Al. 2003, *Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara*, Jakata : Frederich Ebert Shiftung, 2003